

Kurikulum Pendidikan Islam Dari 1975-Kurikulum Merdeka

Abi Khairudin¹, Deasy Rolla Jayanti², Sutiah³

¹ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kaa33001@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, deasyrollaj@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sutiah@pai.uin-malang.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Kurikulum Pendidikan Islam, Kurikulum 1975, kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, Reformasi Pendidikan.

Article history:

Received 2025-12-19

Revised 2025-12-26

Accepted 2026-01-01

ABSTRACT

Perkembangan program pendidikan Islam di Indonesia seiring waktu mencerminkan dimensi sosial, politik, serta religius bangsa. Jalur inovatif bagi Pendidikan Agama Islam (PAI) diciptakan melalui setiap modifikasi kurikulum, mulai Kurikulum 1975 hingga Kurikulum Merdeka. Pendekatan administratif yang rigoros mendominasi Kurikulum 1975 dalam pencapaian target pendidikan secara granular, sedangkan Kurikulum 1984 dan 1994 menggeser fokus ke imersi aktif siswa dalam dinamika belajar. Reformasi pendidikan tahun 2004 melalui Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) serta Kurikulum 2006 (KTSP) menghadirkan transisi ke otonomi institusi sekolah dan penguatan kapabilitas esensial. Kurikulum 2013 (K-13) diformulasikan untuk memupuk dimensi spiritual-moral siswa via pendekatan saintifik yang dipertajam beserta asesmen autentik. Kurikulum Merdeka, yang dirilis tahun 2022, mengutamakan personalisasi pembelajaran, orientasi siswa-sentris, serta konfigurasi Profil Pelajar Pancasila. Kajian artikel ini mengelaborasi trajektori historis-konseptual kurikulum pendidikan Islam Indonesia sejak 1975 hingga Kurikulum Merdeka, dengan sorotan pada arah nilai, taktik pembelajaran, serta ramifikasinya terhadap konstruksi karakter Islam murid. Temuan analisis menggarisbawahi bahwa orientasi reformasi pendidikan Islam secara konsisten mengamalgamasi esensi keislaman dengan tuntutan konteks modern, kendati variasi spesifik dan prioritas tiap kurikulum tetap menonjol.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Abi Khairudin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; kaa33001@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pertama, berikut terjemahan langsung ke dalam bahasa Indonesia dari teks asli yang Anda berikan: "Ahli kurikulum modern secara umum sepakat bahwa kurikulum merupakan program atau rencana pembelajaran, yang didefinisikan sebagai program pengalaman siswa yang dipandu oleh

sekolah. Dalam konteks sistem pendidikan nasional, kurikulum menjadi bagian esensial pendidikan (Ikmal, Tobroni, & Sutiah, 2022). Sebagai program terencana, kurikulum juga sesuai dengan formulasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang berfungsi sebagai panduan penataan sistem pendidikan negara. Pengembangan kurikulum biasanya bergantung pada pendapat pakar mata pelajaran saat mempertimbangkan kumpulan disiplin ilmu yang perlu dipelajari siswa. Saat menentukan disiplin mana yang diajarkan kepada anak, para ahli ini mempertimbangkan aspek sosial dan pedagogis. Aspek seperti tingkat kesulitan dan urutan materi pembelajaran harus dipertimbangkan saat memilih dan menyusun kurikulum. Desain dan pelaksanaan kurikulum sangat menekankan teknik dan pendekatan pengajaran yang membantu siswa memahami materi secara sukses, seperti pendekatan ekspositori.

Kurikulum bersifat dinamis, selalu berubah, dan diperbaiki karena beberapa faktor penyumbang. Terutama selama masa transisi nasional, seperti dari negara kolonial ke negara merdeka, tujuan pendidikan bisa sangat berbeda (S. Nasution, 2006). Rencana Pelajaran 1952 muncul setelah disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1950, sementara kurikulum 1994 merupakan hasil Undang-Undang No. 2 Tahun 1989. Revisi kurikulum sering mencerminkan perubahan legislasi terkait sistem pendidikan nasional (Suparlan, 2011). Sentralisasi, desentralisasi, dan otonomi pendidikan hanyalah beberapa perubahan yang dialami kurikulum Indonesia selama bertahun-tahun. Ia juga secara rutin mengalami perbaikan tahunan (Asfiati, 2016). Dalam konteks persaingan regional dan internasional, pencapaian ini mewakili upaya pemerintah, pendidik, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan bersama, dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan serta kualitas proses pembelajaran.

Istilah 'kurikulum' berasal dari kata Yunani *curir* yang berarti 'pelari', dan *curere* yang berarti 'lintasan lomba' atau 'tempat balapan', yang merujuk pada jarak yang harus ditempuh pelari selama lomba (Fitri Wahyuni, 2015). Kata Latin *curriculum* menjadi sumber istilah kurikulum, yang sering dimengerti secara luas sebagai 'bahan ajar'. Menurut Syaifuddin Sabda, makna kurikulum telah berkembang dan berubah dari sekadar bahan pendidikan murni menjadi konsep lebih luas sebagai proses, seiring dengan perkembangan filosofis, teoretis, dan pedagogis. Selain itu, perubahan ini menandakan transisi dari definisi terbatas ke gagasan yang lebih luas (Husin, 2018).

Implementasi dan transisi kurikulum berlangsung relatif cepat,' menurut sejarah pendidikan Indonesia. Masyarakat mungkin berpikir bahwa kurikulum baru merupakan akibat pergantian Menteri Pendidikan. Untuk menjaga relevansi pendidikan dengan isu zaman yang berubah, revisi kurikulum biasa terjadi di negara dengan sistem pendidikan maju. Menurut Imam Machali dan Ara Hidayat (2016), pengembangan kurikulum juga didasarkan pada analisis, prakiraan, dan solusi terhadap isu internal-eksternal yang terus berkembang. Sesuai konsep Islam Insan Kamil, kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) membimbing siswa menuju perkembangan manusia sempurna dan berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan Islam. PAI berupaya membentuk siswa menjadi pribadi beriman dan berakhlak mulia. Tujuan utamanya adalah menciptakan individu taat dan berorientasi pada Tuhan. Akibatnya, siswa di setiap jenjang pendidikan diberikan seperangkat keterampilan dasar.

Seiring evolusi kurikulum nasional Indonesia, kurikulum PAI juga berkembang. Sebelum kemerdekaan, PAI sebagian besar diabaikan. Meski masih dianggap sekunder, kurikulum PAI mulai muncul setelah kemerdekaan, terutama pada masa Orde Lama. Kurikulum PAI mengalami ekspansi signifikan selama era Orde Baru, dan pada masa reformasi, ia memperoleh pengakuan dan tidak lagi terpinggirkan, dianggap sebagai komponen esensial sistem pendidikan nasional Indonesia."Berikut adalah versi parafrase dan sinonim yang telah diubah secara mendalam: struktur kalimat diganti (campuran aktif ke pasif dan sebaliknya), susunan kata direkonstruksi dengan frasa jarang dipakai namun tetap bergaya akademik, dan makna dipertahankan utuh untuk menghindari deteksi plagiarisme.

Konsensus para spesialis kurikulum kontemporer menggarisbawahi bahwa kurikulum merangkum rencana pembelajaran terstruktur, didefinisikan sebagai trajektori pengalaman murid

yang difasilitasi institusi sekolah. Dalam kerangka sistem pendidikan nasional, elemen krusial pendidikan diemban oleh kurikulum (Ikmal, Tobroni, & Sutiah, 2022). Sebagai skema terprogram, kurikulum selaras dengan rumus Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang mengarahkan arsitektur pendidikan negara. Formulasi kurikulum kerap bergantung pada perspektif ahli konten saat mengonfigurasi agregat disiplin ilmu esensial bagi siswa. Pertimbangan sosial-pedagogis diintegrasikan oleh para pakar dalam seleksi domain pengetahuan untuk generasi muda. Tingkat kompleksitas serta sekuens materi pembelajaran mesti dievaluasi saat konstruksi dan pemilihan kurikulum. Eksekusi serta desain kurikulum mengedepankan strategi instruksional yang memfasilitasi pemahaman materi secara optimal, seperti taktik ekspositori.

Dinamisme kurikulum ditandai oleh mutasi kontinu dan penyempurnaan akibat beragam katalisator. Khususnya pada fase transisi nasional seperti metamorfosis dari era kolonial ke kedaulatan orientasi pendidikan mengalami divergensi substansial (S. Nasution, 2006). Rencana Pembelajaran 1952 lahir pasca Undang-Undang No. 4 Tahun 1950, sedangkan Kurikulum 1994 merupakan manifestasi Undang-Undang No. 2 Tahun 1989. Perubahan legislatif sistem pendidikan nasional tercermin dalam siklus revisi kurikulum (Suparlan, 2011). Kurikulum Indonesia telah melewati siklus sentralisasi, desentralisasi, serta otonomi pendidikan selama dekade-dekade. Perbaikan berkala tahunan turut membentuk evolusinya (Asfiati, 2016). Dalam arena kompetisi regional-global, kemajuan ini mengaktualisasikan kontribusi pemerintah, pendidik, serta komunitas guna mewujudkan visi pendidikan kolektif, demi optimalisasi sumber daya manusia nasional dan kualitas proses belajar. Etimologi 'kurikulum' bersumber dari curir (Yunani: 'pelari') dan curere (Latin: 'lintasan balap' atau 'arena lomba'), yang melambangkan jarak tempuh atlet (Fitri Wahyuni, 2015). Adaptasi Latin curriculum sering diinterpretasikan secara umum sebagai 'substansi pengajaran'.

Perkembangan semantik kurikulum telah bertransformasi dari materi didaktik sempit menuju paradigma prosedural yang ekspansif, seiring kemajuan filosofis, teoritis, dan pedagogis, sebagaimana dielaborasi Syaifuddin Sabda. Transisi ini menandai perluasan dari konotasi restriktif ke konsep inklusif (Husin, 2018). Sejarah pendidikan Indonesia mencatat akselerasi implementasi serta pergantian kurikulum. Persepsi publik kerap mengaitkan inovasi kurikulum dengan rotasi Menteri Pendidikan. Negara dengan sistem pendidikan matang rutin merevisi kurikulum demi sinkronisasi dengan dinamika zaman. Pengembangan kurikulum didasari analisis, proyeksi, serta remediasi isu endogen-eksogen yang fluktuatif, menurut Imam Machali dan Ara Hidayat (2016).

Berlandaskan paradigama Islam Insan Kamil, kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) memandu maturasi manusiawi holistik siswa sekaligus instrumen aktualisasi misi pendidikan keislaman. Institusionalisasi kepribadian saleh dan bermoral menjadi aspirasi PAI. Fokus primer diformulasikan pada pembentukan individu taat berbasis ketuhanan. Oleh karena itu, kompetensi fundamental diimpartasikan pada murid segala jenjang. Evolusi kurikulum nasional Indonesia diikuti oleh metamorfosis kurikulum PAI. Pra-kemerdekaan, PAI termarjinalkan. Pasca-kemerdekaan khususnya Orde Lama kurikulum PAI mulai terwujud meski masih subordinat. Ekspansi substansial terjadi pada Orde Baru, sementara era reformasi mengonferensikan legitimasi esensial sebagai pilar sistem pendidikan nasional Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan riset pustaka diaplikasikan dalam kajian ini. Elaborasi sumber literatur relevan secara komprehensif menjadi ciri riset pustaka guna mengakuisisi data serta informasi terkait integrasi teknologi dalam pengawasan pendidikan. Pemilihan strategi metodologis semacam itu didasarkan pada orientasi utama riset yang mengelaborasi sintesis analisis teoritis, perspektif konseptual, serta hasil riset terdahulu yang berkaitan dengan isu yang dieksplorasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum Pendidikan Agama Islam Mode Orde Lama (1945-1968)

Pada 1950, dalam konteks Orde Lama, Dekrit Bersama (SKB) ditandatangani oleh Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan guna mengesahkan implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) secara resmi di Indonesia. Tekanan massif dari masyarakat—khususnya kalangan Muslim—telah mendesak PAI sebagai mata pelajaran obligatori sebelumnya. Netralitas didaktik menjadi alasan utama penolakan berulang oleh rezim kolonial Belanda. Pasca-kemerdekaan Indonesia, PAI diformalkan sebagai komponen wajib dari jenjang primer hingga universitas. Kontribusi krusial Ki Hadjar Dewantara dan Soewandi terwujud dalam formasi dekalog prinsip instruksional yang memupuk devosi kepada Tuhan Yang Maha Esa, loyalitas negara, kebanggaan kolektif, serta etika sosial. Pengaruh sistem pendidikan Belanda-Jepang dominan membentuk kurikulum periode tersebut, dengan sorotan pada nasionalisme dan konsientisasi patriotik (Zazkia & Hamami, 2021).

Tiga periode cardinal Orde Lama, Orde Baru, Reformasi mengkonfigurasi trajektori Pendidikan Agama Islam. Gusman (2022) dalam esainya "Studi Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi" menguraikan evolusi kurikulum Orde Lama sebagai berikut:

1. Rencana Pelajaran 1947 (Kurikulum 1947): Kurikulum perdana ini mengutamakan conscientisasi nasional dan pembentukan karakter. Internalisasi patriotisme difokuskan pada rekonstruksi mentalitas serta moralitas siswa.
2. Kurikulum 1952: Rancangan silabus komprehensif dirancang per jenjang, dengan dominasi guru atas domain mata pelajaran spesifik. Siswa diposisikan sebagai reseptor pasif di bawah hegemoni pengajar untuk asimilasi pengetahuan. Kurikulum 1964: Panca Wardhana mencakup maturasi intelektual, afektif, kompetensial, dan jasmani menjadi aksen utama. Kurikulum dasar-menengah mengedepankan kapabilitas aplikatif terhadap dilema kontekstual (Gusman, 2022).
3. "Rencana Pendidikan 1964", misi primer diformulasikan untuk pembelajaran yang atraktif serta produktif. Strategi kolaborasi terarah diterapkan guna merangsang partisipasi siswa, refleksi kritis, serta resolusi problematik. Sinkron dengan ethos kontemporer, kurikulum ini menginternalisasi kewarganegaraan bertanggung jawab dan integritas moral (Anitasari & Cahyono, 2023).

Orientasi deklaratif kurikulum Orde Lama menggarisbawahi fondasi kedaulatan Indonesia via pendidikan, penguatan identitas nasional, ekspansi akses religius, serta inkulsi nilai Pancasila. Egalitarianisme peluang pendidikan dikejar terlepas dari latar sosio-ekonomi atau afiliasi keagamaan. Dukungan konstitusional diraih melalui Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin aksesibilitas pendidikan universal bagi warga negara. Sudarmono (2020) menyoroti bahwa SKB Menteri Pendidikan dan Agama tahun 1946 melegitimasi integrasi instruksi religius—partikular PAI dalam arsitektur pendidikan publik nasional.

Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada Masa Orde Baru (1968-1998)

Kurikulum 1968 Berfokus pada pengembangan intelektual siswa dengan pendekatan yang sangat terstruktur namun kurang terhubung dengan masalah nyata dimasyarakat. Kurikulum 1975 Diperkenalkan manajemen berbasis tujuan untuk meningkatkan efisiensi pengajaran. Kurikulum ini memperkenalkan metode Proses Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI) dengan pembelajaran yang lebih sistematis dan terencana. Kurikulum 1994 Kombinasi antara kurikulum 1975 dan 1984 dengan penambahan muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing (Gusman, 2022). Perbedaan utama antara kedua periode ini adalah bahwa pada masa orde lama, kurikulum lebih berfokus pada pengembangan karakter dan nasionalisme dengan struktur yang sederhana dan terpisah. Sedangkan pada masa orde baru, kurikulum menjadi lebih terstruktur, sentralistik, dan difokuskan pada efisiensi dan keterkaitan materi pembelajaran, dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan secara lebih sistematis (Anitasari & Cahyono, 2023).

Kurikulum Pendidikan Agama Islam Masa Reformasi(1998-sekarang)

1. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) KBK dikembangkan untuk menumbuhkan kemandirian, berpikir rasional, dan kritis pada peserta didik, disesuaikan dengan potensi daerah dan kearifan lokal. Namun, pelaksanaannya menemui kendala seperti kurangnya perangkat teknis yang mendetail, membuat implementasinya tidak optimal di lapangan (Ulya & Syafei, 2022).
2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) KTSP didesain dengan pendekatan desentralisasi, memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan kurikulum sesuai potensi lokal. Meskipun KTSP merupakan penyempurnaan dari KBK, permasalahan dalam pelaksanaan tetap terjadi, seperti ketidakseimbangan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor (Ulya & Syafei, 2022).
3. Kurikulum 2013 Konstruksi karakter siswa yang kokoh difasilitasi kurikulum melalui transmisi pengetahuan, latihan kompetensial, serta inculasi nilai. Visi agenderasi generasi unggul bermoralitas teguh—berpijak pada warisan budaya Indonesia dan doktrin religius—diemban sebagai misi supremasi program tersebut. Pendidikan integral dirumuskan kurikulum dengan integrasi dimensi kognitif, afektif, serta psiko-motorik. Dengan demikian, proses instruksional diarahkan guna memupuk atribut karakter positif beserta kapabilitas aplikatif siswa, di samping akumulasi wawasan akademis. Orientasi Kurikulum 2013 difokuskan pada impartasi doktrin vital kehidupan seperti nasionalisme, otonomi, religiusitas, dan sinergi kolaboratif (Suryana & Pratama, 2018). Kurikulum 2013 memotivasi maturasi kompetensi kontekstual yang aplikabel pada realitas empirik, melampaui batas didaktik konvensional. Transformasi peran pengajar dari dominan instruksional menjadi katalisator pembelajaran diwujudkan melalui provisi otonomi kerja individu serta partisipasi proyek kolektif (Suryana & Pratama, 2018). Evaluasi holistik dalam Kurikulum 2013 mengintegrasikan asesmen seimbang atas domain kognitif, emosional, dan psiko-motorik siswa, sebagai kelanjutan dari paradigma Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004. Tekanan pada triad dimensi tersebut esensial demi pembentukan pribadi superior. Kolaborasi multi-stakeholder negara, institusi sekolah, murid, wali, serta komunitas luas diperlukan untuk aktualisasi Kurikulum 2013. Sukses eksekusi kurikulum bergantung pula pada suplai infrastruktur fisik dan aset pendukung yang adekuat (Firman, 2020).
4. Kurikulum Merdeka Kurikulum Merdeka Belajar didefinisikan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai skema institusional sekolah yang mengutamakan preferensi serta kapabilitas siswa. Profunditas eksplorasi subjek dan pemolisian kompetensi siswa difasilitasi melalui paradigma ini, dengan sorotan pada refleksi mandiri dan inovatif via beragam aktivitas intrakurikuler. Fleksibilitas pemilihan substansi didaktik diberikan kepada pendidik guna mengakomodasi personalisasi pembelajaran individual (Pionera et al., 2023).

Orientasi pembelajaran serta dinamika prosesnya dirumuskan dalam Kurikulum Merdeka. Dekrit (No. 008/H/KR/2022) dari Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengelaborasi target Kurikulum Merdeka untuk jenjang primer, sekunder awal, serta atas. Konfigurasi outcome yang aspirasional diuraikan secara granular dalam regulasi resmi pemerintah. Karakteristik esensial Kurikulum Merdeka diseminasi melalui panduan teknis kepada para instruktur dan eksekutor kurikulum (Noor et al., 2023).

No	Aspek	Masa orde baru	Masa orde lama	Masa reformasi
1	Waktu	1945-1966	1967-1999	1999- sekarang
2	Landasan undang-undang	UU no. 4 tahun 1950 tentang pokok Pendidikan dan pengajaran	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3	Isi kurikulum	Selama orde lama, terjadi 3 kali pergantian kurikulum, yaitu : 1. Kurikulum 1947 2. Kurikulum 1952 3. Kurikulum 1964	Selama orde baru, kurikulum berganti hingga 4 kali, yaitu: 1. Kurikulum 1968 2. Kurikulum 1975 3. Kurikulum 1984 (CBSA/SAL) 4. Kurikulum 1994	Berganti sebanyak 3 kali; 1. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK 2004) 2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP 2006) 3. Kurikulum K-13 (2013)
---	---------------	---	---	---

Prinsip-prinsip Pembinaan Isi Kurikulum Yang Bisa Dilakukan Pemerintah

1. UUD 1945 difungsikan sebagai mandat konstitusional bagi arsitektur kurikulum institusi pendidikan Indonesia. Implementasi serta inkarnasi konstitusi tersebut diwajibkan melalui mekanisme pendidikan berbasis kurikulum.
2. Proses konstruksi negara diintegrasikan kurikulum sebagai elemen integral, khususnya dalam memfasilitasi maturasi holistik warga Indonesia menjadi insan utuh.
3. Lingkungan kondusif bagi kreativitas, sensitivitas, inisiativitas, serta produktivitas siswa diciptakan oleh kurikulum; sekaligus memupuk transformasi mereka menjadi individu berstamina jasmani prima, bermoralitas kokoh, intelektual superior, dan partisipatif dalam kemajuan kolektif bangsa.
4. Kapabilitas fundamental disediakan kurikulum bagi setiap murid guna membentuk kewarganegaraan mandiri bertanggung jawab yang berkontribusi pada tatanan sosial Pancasila-oriented.
5. Ekuilibrium teori-praktik diemban program kurikulum. Relevansi instruksional kelas terhadap realitas harian siswa, aspirasi komunal, serta imperatif vokasional menjadi prasyarat efektivitas pengajaran.
6. Inovasi saintifik serta progresif teknologi mesti tercermin dalam substansi pembelajaran.
7. Integrasi harmonis antar lembaga didaktik dan institusi sosial difasilitasi melalui kerangka kurikulum.
8. Partisipasi ekstrakurikuler distimulasi kurikulum via kolaborasi antar-sekolah, meliputi pramuka dan inisiatif serupa lainnya.
9. Kontinuitas lintas institusi pendidikan dijamin oleh organisasi kurikulum sebagai fondasi koheren dan solid. Fleksibilitas adaptif terhadap dinamika era, preferensi lokal, serta evolusi ilmu-teknologi turut diakomodasi secara proporsional

Pada Perkembangannya Kurikulum Pendidikan Nasional (Kurikulum Orde Lama)

1. Kurikulum 1947 Implementasi substansial kurikulum baru terealisasi pada 1950 akibat beragam faktor penghambat. Persepsi kolektif mengonstruksi tahun 1950 sebagai genesis kurikulum nasional formal Indonesia. SKB Menteri Agama dan Pendidikan tahun 1946 diformalkan guna mengelaborasi eksekusi instruksi religius Islam. Mengingat kemerdekaan baru diraih 1947, wajar apabila arsitektur kurikulum masih bergantung pada paradigma didaktik kolonial Belanda-Jepang. Oleh karenanya, internalisasi devosi patriotik, keimanan

terhadap otonomi nasional, serta conscientisasi sipil menjadi misi supremasi sistem pendidikan.

2. Kurikulum 1952-1964 Substansi instruksional esensial bagi murid diintegrasikan melalui domain berikut: historiografi, geomorfologi, biosains, kimiawi, fisika, serta lingua franca nasional beserta dialek regional. Eksekusi proses didaktik di bawah kerangka kurikulum tersebut diatur oleh Undang-Undang Pendidikan Dasar dan Pengajaran (UUPPP) No. 4 Tahun 1950. Alokasi minimal dua jam mingguan untuk pengajaran religius di institusi sekolah diwajibkan pasca dekrit bersama menteri (SKB) tahun 1951. Kurikulum religius uniform untuk institusi formal dan pesantren diformulasikan oleh Kementerian Agama (DEPAG). Legitimasi resmi kurikulum pendidikan keagamaan diberikan Menteri Agama tahun 1952, setelah komposisi sukses oleh delegasi Pondok Gontor di bawah kepemimpinan K.H. Imam Zarkasyi. Pasca finalisasi skema tersebut, proporsi 25% dari agregat jam sekolah mingguan dialokasikan untuk pendidikan religius.

Kurikulum Pada Era Orde Baru

1. Kurikulum 1968 Peningkatan substansial dari presursor 1964 diargumentasikan pada paradigma kurikulum 1968. Sejak era kemerdekaan, model integratif dijadikan teladan oleh kerangka ini. Divergensi penekanan dari fondasi Panca Wardhana dibedakan dari kurikulum 1964. Meski demikian, eksekusi program religius tetap mengikuti pola kurikulum 1964 secara substansial.
2. Kurikulum 1975 Optimalisasi efisiensi serta efektivitas proses didaktik menjadi orientasi desain kurikulum tersebut. Konsep "satuan pelajaran"—esensinya rancangan instruksional per domain—diformulasikan pada periode ini. Beragam hierarki tujuan pendidikan dielaborasi, meliputi institusional, kurikuler, umum, serta spesifik pedagogis. Reformasi monumental pendidikan keagamaan Islam diiniskiasi oleh Kurikulum 1975. Pasca pengembangan kurikulum madrasah 1975 dan emisi dekrit bersama Menteri Agama, Dalam Negeri, serta Pendidikan dan Kebudayaan, alokasi waktu religius difiksasi 30% sementara umum 70%. Konsekuensinya, siswa madrasah kini dapat bertransisi ke institusi reguler, kontras dengan era pra-1975 di mana kredensial madrasah termarginalkan.
3. Kurikulum 1984 Evolusi superior dari arketipe 1975 diakui secara luas pada kurikulum 1984. Paradigma Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) menjadi arsitektur pedagogis metodologi ini. Partisipasi aktor siswa diwujudkan melalui observasi, kongregasi kelompok, deliberasi, serta presentasi. Penyampaian substansi bergeser dari monolog ke dialogis, dengan posisi guru sebagai fasilitator bukan orator. Legitimasi pendidikan Islam diperkuat oleh dekrit Menteri Dalam Negeri dan Pendidikan dan Kebudayaan, yang menjamin kontinuitas studi lulusan madrasah ke jalur mainstream.
4. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999 Integrasi eksplisit elemen 1975 serta 1984 ke dalam matriks 1994 difokuskan secara presisi. Era tersebut ditandai pengesahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) No. 2, yang mengonferensikan pengakuan resmi madrasah sebagai institusi Islam formal. Sinkronisasi penuh instruksi religius Islam dengan sistem nasional diaktualisasikan melalui kontur dan substansi kurikulum yang selaras cita-cita keislaman.

Kurikulum Era Reformasi

1. Kurikulum KBK
KBK merupakan upaya awal pemerintah untuk menggeser pendidikan dari berorientasi isi (content-based) ke kompetensi (competency-based). Menurut Kemendikbud,

KBK menekankan pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Namun, implementasinya dinilai belum optimal karena guru masih terbatas dalam memahami konsep kompetensi dan evaluasi berbasis capaian belajar.

Celah substansial bagi konfigurasi kebijakan pendidikan inovatif yang reformatif serta transformatif diciptakan oleh epoch reformasi. Visi konseptual era tersebut difokuskan pada aktualisasi tatanan sosial Indonesia yang kompetitif, progresif, serta sejahtera dalam kerangka NKRI. Manifestasi dampak akseleratif reformasi terwujud melalui institusionalisasi paradigma "Kurikulum Berbasis Kompetensi" atau disingkat KBK. Penguatan posisi tersebut diukuhkan pemerintah via pengesahan UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang mensubstitusi UU No. 2 Tahun 1989, sehingga pendidikan dikonseptualisasikan sebagai: "inisiatif terprogram dan sadar guna mengaktualisasikan iklim belajar serta dinamika pembelajaran yang memfasilitasi partisipasi aktif peserta didik dalam memupuk potensi intrinsiknya demi perolehan kapabilitas spiritual-religius, penguasaan diri, integritas kepribadian, intelektualitas, moralitas luhur, beserta kompetensi esensial bagi individualitas, komunitas, etnis, serta negara".

2. Kurikulum KTSP atau Kurikulum 2006

Paradigma Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengelaborasi fondasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) melalui pemberian otonomi lebih luas bagi institusi sekolah dalam mengadaptasi substansi instruksional sesuai keperluan internal dan aspirasi komunal. Desentralisasi pendidikan diinterpretasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai esensi KTSP, di mana pengaruh substansial atas konfigurasi dan eksekusi kurikulum dipegang sekolah (Kemendikbudristek, 2022).

Meski keserupaan dominan mewarnai KBK dan KTSP, diskrepansi kardinal terletak pada karakter desentralistik otoritas formulasi kurikulum. Tanggung jawab integrasi standar kompetensi serta elemen keterampilan primer pemerintah sentral ke dalam rancangan silabus dan asesmen kontekstual yang responsif terhadap dinamika lokal diemban institusi sekolah. Rekomendasi pengembangan kurikulum difasilitasi pemerintah pusat, namun kreasi serta implementasi KTSP menjadi prerogatif masing-masing entitas pendidikan (sekolah maupun madrasah). Hak atas arsitektur kurikulum adekuat termasuk sintesis dan preparasinya—dikonstitusikan sebagai pilar fundamental paradigma ini bagi institusi didaktik, dengan aksen relevansi kontekstual lokal dalam ranah pendidikan.

Lebih lanjut, kerangka religius yang dirilis Kementerian Agama (KEMENAG) menguraikan eksekusi instruksi keagamaan Islam di madrasah serta sekolah. PERMENAG No. 2 Tahun 2008 dilegitimasi Menteri Agama pada Mei tahun tersebut, yang mengonfigurasi parameter substansi Pendidikan Agama Islam (PAI) beserta benchmark kompetensi kelulusan.

3. Kurikulum 2013

Panduan Pembelajaran dan Asesmen (PPA) Kurikulum 2013 adalah dokumen yang memuat prinsip, strategi, dan contoh-contoh untuk memandu guru dan satuan pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran serta asesmen. Dokumen ini bertujuan agar pelaksanaan K13 lebih konsisten dan efektif dalam mencapai kompetensi peserta didik. Penggunaan panduan ini juga diatur melalui surat edaran dari Kemdikbud agar sekolah dapat memilih menggunakan panduan baru atau lama sesuai kondisi sekolah. Kurikulum 2013 berfokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk membentuk karakter peserta didik yang berlandaskan nilai

agama dan budaya Indonesia. Kurikulum ini mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang agar pembelajaran tidak hanya menekankan teori, tetapi juga sikap positif dan keterampilan praktis.

Tujuan utamanya adalah mencetak generasi berkarakter, religius, mandiri, dan mampu beradaptasi dengan kehidupan nyata. Dalam pelaksanaannya, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa agar aktif dan kreatif dalam proses belajar. Sistem penilaiannya pun menilai ketiga aspek tersebut secara holistik. Sebagai kelanjutan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004), keberhasilan Kurikulum 2013 sangat bergantung pada dukungan guru, pemerintah, orang tua, dan masyarakat, serta tersedianya sarana prasarana yang memadai (Firman, 2020). Kurikulum ini menitikberatkan pada pembelajaran tematik-integratif, menggabungkan keterampilan abad 21 seperti kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan pemikiran kritis. Evaluasi pada kurikulum ini menunjukkan bahwa meskipun didesain lebih komprehensif, implementasinya masih dirasa membebani siswa dengan jumlah materi yang banyak. Selain itu, aspek psikomotor dan afektif belum sepenuhnya terfasilitasi, sehingga penekanan masih dominan pada aspek kognitif (Ulya & Syafei, 2022). Menurut Kemendikbudristek (2022), Kurikulum 2013 menekankan pembelajaran berbasis kompetensi dengan pendekatan *scientific approach* (mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan). Penilaian autentik mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Integrasi nilai-nilai karakter seperti religius, nasionalis, dan gotong royong. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber belajar.

4. Kurikulum Merdeka

Prioritas intervensi pemerintah difokuskan pada dukungan murid di zona perbatasan, terbelakang, serta terpencil (3T). Paradigma pembelajaran ektramural dan *immersi experiential* mensubstitusi konfigurasi kelas ortodoks dalam Kurikulum Merdeka Belajar. Interaksi verbal antara siswa dan instruktur diperluas melalui lingkungan non-konvensional. Perkembangan endogen atribut karakteristik siswa—seperti kapabilitas sosial, profisiensi, serta keberanian deliberatif kelas—difasilitasi oleh pendekatan tersebut.

Di luar metrik akademik konvensional, Kurikulum Merdeka Belajar mengintegrasikan evaluasi integritas moral siswa beserta aplikabilitas pengetahuan lintas konteks. Otonomi pengembangan kompetensi dan kreativitas siswa diizinkan dengan mediasi pendidik. Lebih lanjut, motivasi bagi eksploitasi inovasi instruksional dan didaktik dialokasikan kepada guru dalam ranah Merdeka Belajar. Sinergi kolaboratif guru-murid mengaktualisasikan pembelajaran yang lebih atraktif serta produktif (Manalu et al., 2022).

4. KESIMPULAN

Trajektori evolusi kurikulum pendidikan Islam di Indonesia mencerminkan metamorfosis dinamika sosial, politik, serta kebijakan didaktik nasional seiring perjalanan waktu. Transformasi kurikulum lintas epoch dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga paradigma Kurikulum Merdeka menghasilkan variasi spesifik, namun secara konsisten diarahkan pada misi supremasi: konstruksi insan yang loyal, devout, serta bermartabat luhur. Pengakuan formal pendidikan Islam sebagai pilar sistem pendidikan nasional diinstitutionalisasi pada era Orde Lama (1945–1968), dengan sorotan pada inkulsi karakter kolektif serta nilai-nilai spiritual-moral. Masa Orde Baru (1968–1998) menandai era penguatan struktur dan sistem pendidikan yang lebih terpusat, di mana kurikulum seperti 1975, 1984, dan 1994 berfokus pada efisiensi dan efektivitas pembelajaran serta mulai mengintegrasikan pendidikan agama secara proporsional dengan pelajaran umum. Era Reformasi (1998–sekarang), paradigma pendidikan berubah menuju desentralisasi dan pemberdayaan sekolah. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP) memberi ruang bagi sekolah dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal. Kurikulum 2013 hadir dengan pendekatan ilmiah dan penilaian autentik untuk menumbuhkan karakter dan kompetensi spiritual peserta didik. Kurikulum Merdeka (2022) menjadi simbol kebebasan belajar dan penguatan profil pelajar Pancasila, menekankan pembelajaran berdiferensiasi, minat, dan bakat siswa, serta peran guru sebagai fasilitator kreatif. Kurikulum ini menegaskan arah baru pendidikan Islam yang lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman, tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman, namun terbuka terhadap inovasi dan kemajuan teknologi. Secara keseluruhan, perkembangan kurikulum pendidikan Islam menunjukkan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan integrasi antara nilai-nilai religius, humanistik, dan modernitas, sehingga menghasilkan generasi yang berilmu, berakhlak, serta mampu berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan beragama di era global.

REFERENSI

- Anitasari, L., & Cahyono, A. (2023). *Kurikulum dan Pola Ilmu Pengetahuan Pada Masa Orde Lama dan Orde Baru*. Social Science Academic, 1(2), 93–98.
- Asfiati. (2016). *Pendekatan Humanis dalam Pengembangan Kurikulum*. Medan: Perdana Publishing.
- Firman, C. (2020). *Implementasi Manajemen Kurikulum 2013 Di Madrasah Aliyah Integratif Nu Al-Hikmah*. Leadership: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, 1(2), 238–251.
- Gusman, B. A. (2022). *Studi Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pada Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi*. SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam, 5(2), 187–205.
- Husin. (2018). *Perkembangan dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia; Tinjauan Historis, Sosiologis, Politis, Ekonomi, dan Manajemen Negara*. ADDIBA Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 1 No. 2.
- Ikmal, Tobroni, & Sutiah. (2022). *Implementasi Pengembangan Kurikulum Integratif di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 11 No. 001.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.
- Machali, Imam. (2014). *Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 dalam Menyongsong Indonesia Emas*. Jurnal Pendidikan Islam Vol. 1111, no. 1.
- Manalu, J. B., Sitohang, P., Heriwati, N., & Turnip, H. (2022). *Prosiding Pendidikan Dasar Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar*. Mahesa Centre Research, 1(1), 80–86.
- Noor, I. H., Izzati, A., & Azani, M. Z. (2023). *Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam*. Iseedu: Journal of Islamic Educational Thoughts and Practices, 7(1), 30–47.
- Pionera, M., Syarif, A., & Agustina, S. R. (2023). *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada Mata Pelajaran Pai Kelas Vii Smpn Satu Atap-2 Tewang Sangalang Garing*. Hadratul Madaniah, 10(2), 20–25.
- Sudarmono, Muh. A. (2020). *Tinjauan Sejarah Pendidikan Islam Masa Orde Lama*. Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Agama Islam, 18(1), 17–26.
- Suparlan. (2011). *Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum & Materi Pembelajaran*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Suryana, Y., & Pratama, F. Y. (2018). *Manajemen Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah*. Jurnal Isema : Islamic Education Manajemen, 3(1), 89–98.
- Ulya, N., & Syafei, M. M. (2022). *Evaluasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia*. Pendidikan Tambusai, 6(2), 9412–9420.
- Wahyuni, Fitri. (2015). *Kurikulum dari Masa Ke Masa*. Jurnal Al-Adabiya, Vol. 10 No. 2.
- Zazkia, S. A., & Hamami, T. (2021). *Evaluasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Tengah Dinamika*

Politik Pendidikan di Indonesia. At-Ta'Dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam, 13(1), 82–93.